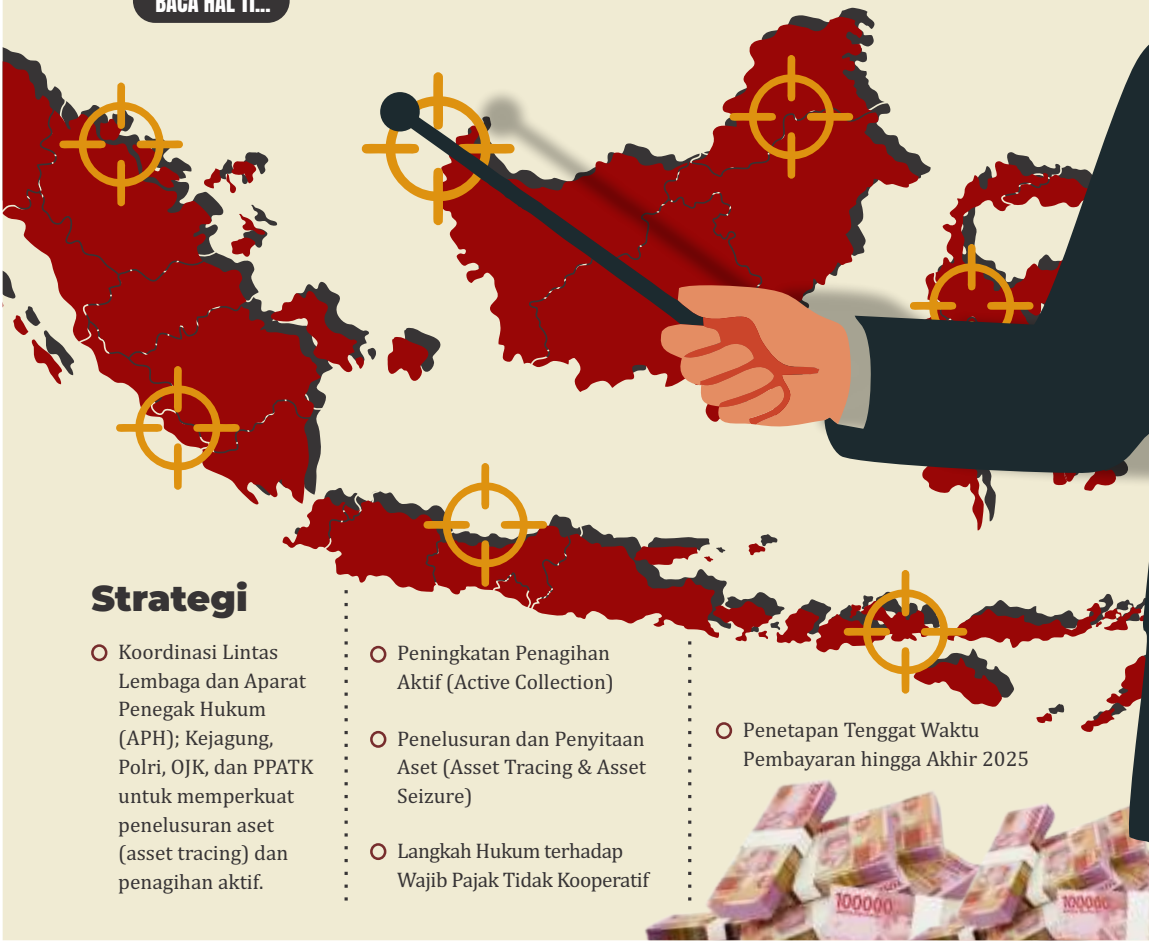




ATUR STRATEGI BURU 200 PENUNGGAK PAJAK BESAR

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah tidak sabar lagi untuk memburu para penunggak pajak besar yang jumlahnya mencapai 200 wajib pajak. Terlebih, data 200 penunggak pajak ini sudah ada di atas meja, sehingga berbagai strategi pun diatur untuk mendapatkan potensi pajak dari mereka yang nilainya mencapai Rp 50 triliun. Untuk melakukan asset tracing ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Agung, Polri, Otoritas Jawa Keuangan (OJK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk penagihan aktif. Selain itu juga memastikan akan terus mengejar para penunggak pajak, hingga mengambil langkah hukum, termasuk penyitaan aset jika pelaku tidak kooperatif. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan para penunggak pajak ini membayar sisa kewajibannya hingga akhir 2025. Dari 200 penunggak pajak ini ada indikasi kuat sebagian merupakan para pengusaha kelapa sawit. Tunggakan pajak mereka juga sudah berlangsung lama, sebab informasi tersebut sudah terendus sejak era Presiden Joko Widodo. Banyaknya tunggakan pajak yang bernilai cukup fantastis ini jelas berdampak pada pendapatan negara. Sebab penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Hingga per 31 Agustus 2025, pemerintah sebelumnya melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.135,4 triliun, atau baru 54,7% dari target APBN yang dipatok senilai Rp2.076 triliun. Penerimaan pajak masih kontraksi 5,1%, kemudian pendapatan negara secara keseluruhan juga masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BACA HAL 11...



Strategi

- Koordinasi Lintas Lembaga dan Aparat Penegak Hukum (APH); Kejaksaan, Polri, OJK, dan PPATK untuk memperkuat penelusuran aset (asset tracing) dan penagihan aktif.
- Peningkatan Penagihan Aktif (Active Collection)
- Penelusuran dan Penyitaan Aset (Asset Tracing & Asset Seizure)
- Penetapan Tenggat Waktu Pembayaran hingga Akhir 2025
- Langkah Hukum terhadap Wajib Pajak Tidak Kooperatif



Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan tidak menutup adanya pembukaan lowongan tambahan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan tahap pertama program tersebut.

"Kami sudah menyiapkan hingga 100 ribu lowongan magang bergaji UMP, tapi kami evaluasi dulu yang 20 ribu. Kalau hasilnya baik, bisa ditambah," ujar Febrio di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025) dilansir tempo.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa program magang bergaji UMP merupakan terobosan pemerintah untuk mempercepat transisi fresh graduate ke dunia kerja. Dengan program tersebut, pemerintah ingin memastikan lulusan perguruan tinggi dapat segera bekerja dan berkontribusi pada ekonomi nasional.

Terkait dengan upah, ia mengatakan bahwa program ini memberikan upah setara UMP di masing-masing daerah. Perusahaan diperbolehkan memberikan bayaran lebih tinggi.

Ia juga menyinggung setiap tahun terdapat tambahan sekitar 3,5 juta angkatan kerja baru, baik dari lulusan perguruan tinggi maupun penduduk usia produktif yang baru masuk pasar kerja. Dengan adanya program magang bergaji UMP, diharapkan sebagian besar tenaga kerja baru tersebut dapat terserap dengan cepat.

"Memang banyak yang bekerja di sektor informal, tapi itu tidak selalu buruk. Sekarang ada gig economy yang justru lebih fleksibel dan bisa menghasilkan pendapatan menarik. Namun, kami tetap mendorong agar lapangan kerja formal terus bertambah dan lebih berkualitas," ujar Febrio.

Sebelumnya, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa menandakan bahwa ia tidak ingin mengalokasikan anggaran terlalu banyak untuk tersebut jika belum mampu menyerap peserta secara maksimal. Menurutnya, pemerintah sudah punya rencana untuk terus menambah kuota magang hingga mencapai 100 ribu peserta secara bertahap.

"Itu (kuota) 20 ribu orang pertama. Nanti kalau keserap, tambah lagi 20 ribu. Kalau keserap lagi, tambah 20 ribu lagi sampai targetnya 100.000," ujar Purbaya di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (8/10/2025).

"Tapi saya enggak mau alokasikan dana terlalu banyak ketika

KUOTA MAGANG BERGAJI UMP BISA SAMPAI 100 RIBU PESERTA

Program magang fresh graduate bergaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) yang awalnya untuk 20 ribu peserta, kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan hingga 100 ribu lowongan di seluruh Indonesia. Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) tidak ingin mengalokasikan anggaran terlalu banyak program tersebut jika belum mampu menyerap peserta secara maksimal.



Ilustrasi para fresh graduate mencari dan mendaftar kerja.

programnya belum terserap (maksimal)," tegasnya dilansir Kompas.

Apa yang disampaikan Purbaya sebagai bentuk respon dari pertanyaan soal penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Selain magang, pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan untuk memicu pembukaan lapangan kerja baru. "Kita tadi coba hidupkan kembali ekonomi dalam jangka panjang, ya mungkin beberapa bulan ke depan. Dan nanti kita ada program stimulus, antara lain tadi itu program magang yang dibayarnya oleh pemerintah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai Rp 396 miliar untuk program magang fresh graduate.

Besaran anggaran itu dibagi dua untuk pelaksanaan program tahun 2025 dan 2026, sehingga masing-masing tahun mendapat alokasi sekitar Rp 198 miliar.

Anggaran ini digunakan untuk membayar uang saku peserta magang yang disesuaikan dengan masing-masing besaran upah minimum provinsi (UMP). "Insentifnya perusahaan tidak bayar, UMP-nya

dibayar oleh pemerintah," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Dengan demikian, perusahaan yang menerima peserta magang untuk program ini hanya perlu menyediakan posisi pekerjaan untuk diisi para pemagang.

Untuk diketahui, program magang ini masuk dalam 8 paket stimulus ekonomi yang akan diimplementasikan pemerintah pada Kuartal IV 2025.

Khusus untuk program magang fresh graduate ini, pemerintah akan mengimplementasikannya selama 6 bulan hingga Kuartal I 2026.

Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan ke depannya, tergantung pada evaluasi pelaksanaan pada 6 bulan mendatang.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya membuka pendaftaran program magang nasional "Siap Kerja" pada Selasa (7/10/2025). Program ini menawarkan kesempatan magang bergaji setara UMP bagi lulusan D3, D4, dan S1, dan merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah dalam paket 8+4+5.

Pendaftaran program ini di link website maganghub.kemnaker.go.id pada Rabu (8/10/2025) sempat mengalami gangguan. Tersebut

sempat tidak bisa diakses. Namun, proses pendaftaran masih dalam tahap input dari data-data pendaftaran peserta magang yang masuk.

Berdasarkan informasi di laman MagangHub, pendaftaran perusahaan dan usulan program magang dibuka mulai 1-7 Oktober 2025. Setelah itu, pendaftaran peserta akan berlangsung pada 7-12 Oktober 2025.

Proses seleksi dan pengumuman hasil dijadwalkan pada 13-14 Oktober 2025, sedangkan pelaksanaan magang dimulai pada 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026.

Kemnaker juga menyebutkan, program magang bagi fresh graduate ini akan berlanjut pada 2026 dengan target kuota bertahap hingga 100.000 peserta.

Untuk dapat mengikuti program magang nasional ini, peserta harus memenuhi beberapa ketentuan. Mereka harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.

Selain itu, peserta merupakan lulusan Diploma atau Sarjana maksimal satu tahun sejak tanggal ijazah dan berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (han,ist/lut)

SERIOUS, DPR MINTA APARAT TINDAK IMPOR TEKSTIL ILEGAL

Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ilegal ke wilayah Indonesia sudah menjadi permasalahan yang serius. Atas penilaian itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta aparat penegak hukum maupun kementerian/lembaga terkait untuk menindak tegas aksi impor tekstil ilegal yang merugikan industri tekstil nasional.

Menurut dia, jumlah impor TPT ilegal mencapai 28 ribu kontainer setiap tahunnya. Selain memukul industri nasional, hal itu juga mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor padat karya tersebut.

"Masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal ini sudah menembus titik kritis. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal kelangsungan hidup industri nasional," kata Lamhot, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, salah satu akar persoalan yang memperparah masuknya barang ilegal adalah kawasan berikat yang tidak lagi optimal menjalankan fungsi utamanya. Seharusnya, kata dia, kawasan berikat berperan sebagai fasilitas pendukung ekspor dan tempat bagi perusahaan memproduksi barang untuk tujuan pasar luar negeri dengan kemudahan fiskal. Namun dalam praktiknya, sejumlah kawasan tersebut justru beralih fungsi menjadi jalur distribusi barang impor ke pasar domestik.

"Fungsi kawasan berikat sudah melenceng jauh dari semangat awalnya. Banyak yang tidak lagi fokus untuk mendukung ekspor, tapi justru menjadi pintu masuk bagi produk impor yang akhirnya membanjiri pasar dalam negeri," katanya dilansir antara.

Untuk itu, dia meminta supaya pengawasan terhadap kawasan berikat harus diperketat dan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme pelaporan barang masuk dan keluar.

Karena itu, dia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kawasan berikat yang diduga menyalahgunakan izin.

"Kawasan berikat itu awalnya dimaksudkan untuk menunjang

ekspor, bukan malah menjadi tempat distribusi barang impor ke dalam negeri. Ini penyimpangan fungsi yang harus segera dibenahi," katanya.

Berdasarkan data Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI), menurut dia, ada sekitar 60 perusahaan tekstil nasional telah menutup usahanya dalam dua tahun terakhir akibat tekanan berat dari barang impor ilegal dan kebijakan

yang dinilai terlalu longgar terhadap produk luar. Salah satu yang terdampak serius adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi menghentikan operasionalnya.

Selain itu, menurut dia, dalam kurun dua tahun terakhir, sekitar 250.000 pekerja kehilangan mata pencaharian di sektor TPT.

"Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada keluarga-keluarga yang kehilangan penghasilan. Kalau kondisi ini tidak segera dibenahi, industri tekstil kita bisa mati perlahan," kata dia.

Karena itu, dia meminta agar pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta aparat penegak hukum. Ia menilai pengawasan di pintu masuk tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengawasan berlapis di kawasan berikat dan jalur distribusi dalam



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga. (Antara)

negeri.

"Persoalan ini tidak bisa ditangani parsial. Harus ada langkah menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan oknum yang bermain di balik impor ilegal," katanya.

Majelis Rayon Tekstil Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI Tekstil) juga men mengatakan bahwa maraknya praktik mafia impor ilegal dan kuota impor menjadi persoalan utama masalah industri tekstil di Indonesia. Sebab, praktik impor ilegal tersebut merusak pasar domestik.

Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto, mengatakan pemerintah dan asosiasi pengusaha tidak boleh terus menjadikan buruh sebagai korban atas lemahnya daya saing industri nasional. "Sudah saatnya pengusaha berhenti menjadikan pekerja sebagai tumbal daya saing. Akar masalahnya ada pada mafia impor yang dibiarkan merajalela," tegas Agus dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Agus mendesak pemerintah untuk membersihkan birokrasi dari pejabat yang terlibat mafia impor agar industri nasional bisa kembali tumbuh sehat dan kompetitif. "Setiap upaya membendung impor selalu dihalangi oknum birokrasi, bahkan menteri ikut-ikutan. Kalau serius ingin memperkuat industri, bersihkan dulu pejabat dan pengusaha yang bermain di jalur impor," tegasnya lagi.

Menurut Agus, industri TPT domestik kehilangan daya saing bukan karena upah buruh tinggi, tetapi karena pasar dalam negeri dibanjiri barang impor murah yang tidak terkendali KAHMI Tekstil juga menyatakan dukungan terhadap usulan kenaikan upah minimum sebesar 10% pada 2026, dengan alasan pemerataan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

"Keadilan ekonomi tidak akan tercapai jika kesejahteraan buruh terus ditekan, sementara oknum pejabat dan mafia impor dibiarkan menikmati keuntungan besar," ujar Agus.

Senada dengan KAHMI Tekstil, Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Rudiansyah mengatakan bahwa upah buruh yang layak harus diimbangi dengan kebijakan proteksi pasar dalam negeri. Ia menyoroti penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 127,7 poin pada Desember 2024 menjadi 117,2 poin pada Agustus 2025, yang menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat akibat arus barang impor.

"Konsumen memang diuntungkan dengan harga murah, tapi ekonomi nasional justru melemah. Pemerintah harus serius menegakkan regulasi impor dan memperkuat produk lokal," ujar Rudiansyah.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin memberantas importasi ilegal. Menurut Purbaya, masalah yang mengganggu persaingan usaha dalam negeri adalah maraknya penyelundupan barang impor.

Ketua Umum API, Jemmy Kartiwa, mengatakan masalah utama paling dominan dari terkendalanya pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri adalah importasi ilegal. Jemmy mengatakan importasi ilegal mengakibatkan negara kehilangan salah satu sumber pemasukan yang penting, yaitu pajak impor atau bea masuk. (han,ant,ist/lut)



Persoalan ini tidak bisa ditangani parsial. Harus ada langkah menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan oknum yang bermain di balik impor ilegal,"

Lamhot Sinaga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Bila tidak ada gangguan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, Indonesia diyakini mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

"Alhamdulillah, bila tidak ada kendala cuaca ekstrem, Inshaallah dua bulan lagi Indonesia tidak akan impor beras lagi. Kita menuju swasembada," ujar Amran usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), produksi beras nasional hingga akhir September 2025 telah mencapai 33,1 juta ton, naik signifikan dibanding periode sama tahun lalu. Dengan proyeksi panen di sejumlah sentra seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan, produksi beras Indonesia pada akhir tahun diperkirakan menembus 34 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton dibanding tahun 2024 yang hanya 30 juta ton.

"Perkiraan produksi tahun ini 34 juta ton. Tahun lalu hanya 30 juta ton, jadi ada lonjakan 4 juta ton. Ini berkat intensifikasi dan perluasan lahan," tambahnya.

Kementan mencatat, kenaikan produktivitas petani juga dipengaruhi oleh keberhasilan program pompanisasi dan bantuan benih unggul di lebih dari 400 ribu hektare lahan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya deflasi harga beras sebesar 0,13% pada September 2025, pertama kali dalam lima tahun terakhir. Penurunan harga tersebut menjadi sinyal positif bahwa suplai beras di pasar dalam kondisi aman.

"Bulan ini beras justru deflasi, minus 0,13%. Ini pertama kalinya dalam lima tahun terakhir terjadi di bulan September, saat biasanya harga naik karena musim paceklik," jelas Amran.

Kementan juga menargetkan penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) melalui kerja sama dengan Bulog agar pasokan tetap terjaga menjelang akhir tahun. Berdasarkan data terakhir Bulog per Oktober 2025, stok CBP mencapai lebih dari 2 juta ton, cukup untuk menjaga stabilitas harga hingga kuartal pertama 2026.

Selain beras, Kementan berupaya mengejar swasembada jagung dan kedelai pada tahun depan, dengan strategi intensifikasi pertanian berbasis teknologi dan perluasan lahan produktif di Kalimantan dan Papua.

Pemerintah berharap capaian swasembada pangan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global akibat perubahan iklim dan geopolitik.

Bapanas Tegaskan Beras Bulog Berkualitas

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras Cadangan Beras

MENTAN AMRAN: 2 BULAN LAGI INDONESIA SWASEMBADA PANGAN

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam dua bulan ke depan. Amran menyebut, langkah tersebut makin nyata karena pemerintah sudah tidak melakukan impor beras sejak pertengahan 2025. Perkiraan produksi tahun ini 34 juta ton



Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman

Pemerintah (CBP) yang disalurkan melalui Perum Bulog kepada masyarakat memiliki kualitas baik dan aman dikonsumsi.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan, pihaknya terus mengawal ketat standar mutu beras agar distribusi ke masyarakat tidak menimbulkan keluhan maupun penurunan kualitas.

"Kami di Badan Pangan Nasional

bersama Bulog memastikan hanya beras berkualitas baik yang disalurkan. Pengawasan kualitas dilakukan secara konsisten, karena untuk masyarakat harus zero mistake," ujar Arief di Jakarta.

Menurut Arief, pengelolaan stok CBP telah melalui proses pemeriksaan berlapis sejak tahap penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran. Bapanas dan Bulog menerapkan

standar mutu nasional dengan memperhatikan aspek kebersihan, kadar air, dan ketahanan simpan. (wid,rls,blo/dya)

DATA BERAS INDONESIA

- Produksi beras nasional (BPS): 33,1 juta ton (Januari-September 2025)
- Proyeksi akhir tahun (Kementan): 34 juta ton
- Deflasi beras: -0,13% (BPS, September 2025)
- Ekspor pertanian naik: 8,4% year-on-year (FAO, 2025)

Gambaran Stok Beras Nasional

- Total stok beras Bulog: 3,89 juta ton
- Cadangan Beras Pemerintah (CBP): 3,83 juta ton
- Beras komersial: 56,6 ribu ton
- Penyerapan produksi dalam negeri: 3,09 juta ton
- Penyaluran ke masyarakat: 870,8 ribu ton
- Harga beras medium nasional: ±Rp13.300/kg (PIHPS, Okt 2025)
- Kenaikan stok dibanding 2024: +1,4 juta ton



Bulog Sukses Serap 16 Ribu Ton Jagung dalam Sebulan

UPAYA pemerintah memperkuat ketahanan pangan terus menunjukkan hasil positif. Badan Pangan Nasional (Bapanas) men-catat serapan jagung oleh Perum Bulog melonjak signifikan hingga mencapai 16.000 ton hanya dalam waktu satu bulan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa peningkatan serapan ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas lembaga, termasuk dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang membantu percepatan distribusi dan pengawasan di lapangan.

"Dalam sebulan ini Bulog berhasil menyerap total 16.000 ton jagung. Salah satu faktor keberhasilannya adalah dukungan penuh dari Bapak Kapolri dan seluruh jajaran," ujar Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Berdasarkan data Bapanas per 8 September 2025, total pengadaan jagung dalam negeri sebelumnya

tercatat 68.000 ton. Namun, hanya dalam waktu empat minggu, angka itu meningkat menjadi 84.100 ton, atau naik 23,6 persen. Lonjakan ini menambah kekuatan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pakan ternak dan harga jagung nasional.

Menurut Arief, peningkatan serapan tersebut juga sejalan dengan tren positif produksi jagung nasional. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan proyeksi produksi jagung dengan kadar air 14 persen selama periode Januari-November 2025 mencapai 15,25 juta ton, naik 1,19 juta ton dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara bulanan, produksi jagung pada September 2025 mencapai 1,28 juta ton, sempat turun sedikit di Oktober menjadi 1,24 juta ton, namun kembali naik pada November diproyeksikan mencapai 1,31 juta ton.

"Konsep CJP itu dari petani untuk peternak. Jadi, saat harga jagung di

tingkat peternak bergejolak, stok CJP digelontorkan untuk menstabilkan pasokan. Kualitasnya pun harus dijaga, karena dari situ masyarakat akan mendapatkan telur dan daging ayam yang baik," jelas Arief.

Dari sisi kesejahteraan petani, tren juga menunjukkan arah positif. Indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) per September 2025 tercatat 113,95, tertinggi sepanjang tahun dan menjadi rekor sejak April 2024. Kenaikan itu dipicu oleh kelompok tanaman padi yang naik 0,09 persen dan kelompok palawija, termasuk jagung, yang tumbuh 1,10 persen.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk jagung pakan menjadi instrumen penting Bapanas dalam mengatur pasokan di pasar. Program yang dijalankan sejak 2023 ini menyalurkan 27,6 ribu ton jagung pakan di tahun pertama dan meningkat drastis menjadi 275,5 ribu ton pada 2024. (wid,rls,ist/dya)

SELAMAT TINGGAL SOLAR IMPOR B50 MULAI BERLAKU 2026

Pemerintah berkomitmen mempercepat transisi energi bersih dengan menerapkan biodiesel 50 persen (B50) pada tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menghentikan impor solar sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Pengamat mengingatkan, bahan baku untuk biodiesel relatif aman karena pasokan minyak kelapa sawit melimpah. Namun, untuk bioetanol, tantangan lebih besar karena bergantung pada produksi tanaman pangan seperti tebu dan singkong.



Contoh bahan baku yang terdiri dari solar murni, biosolar (campuran solar dan biodiesel), dan fame hasil pengolahan dari minyak kelapa sawit (CPO). (dok.pertamina)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar produksi solar dengan campuran bahan bakar nabati (BBN) dari minyak kelapa sawit

sebesar 50 persen mulai diterapkan tahun depan.

"Sudah diputuskan, insyaallah tahun 2026 kita dorong ke B50," ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Penerapan B50 menjadi kelanjutan dari kebijakan B40 yang mulai diwajibkan awal tahun ini. Saat ini, serangkaian uji coba pada mesin kapal, kereta, dan alat berat sudah memasuki tahap keempat dan diperkirakan rampung dalam enam hingga tujuh bulan mendatang.

Sejak program biodiesel dimulai tahun 2016, campuran BBN dalam solar terus meningkat dari B10 hingga kini mencapai B40. Hasilnya, impor solar berhasil ditekan menjadi 4,9 juta barel per tahun, atau hanya sekitar 10 persen dari total kebutuhan nasional yang mencapai 39-40 juta barel.

Dengan implementasi B50, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar pada paruh kedua 2026.

"Ini keputusan berani karena berhadapan langsung dengan para importir," tegas Bahlil.

Selain menghemat devisa, penerapan B50 juga akan mendukung petani sawit dalam negeri. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dari sisi ketersediaan metanol sebagai bahan pencampur biodiesel. Kapasitas produksi metanol nasional baru mencapai 400.000 ton, jauh dari kebutuhan sekitar 2,3 juta ton per tahun.

Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah berencana membangun pabrik metanol di Bojonegoro sebagai bagian dari agenda hilirisasi.

"Kita ingin seluruh bahan campuran FAME (minyak nabati dari CPO dan metanol) diproduksi di dalam negeri," jelas Bahlil.

Selain di solar, pemerintah juga

menyiapkan transisi energi pada bahan bakar bensin dengan menerapkan campuran bioetanol 10 persen (E10) secara mandatori. Kebijakan ini akan memperluas penerapan E5 (campuran 5 persen) yang sudah berlaku sejak 2023 pada produk BBM RON 95 milik Pertamina.

"Kami wajibkan etanol 10 persen untuk bensin. Ini bukan hanya mengurangi impor, tapi juga membuka lapangan kerja di sektor pertanian," kata Bahlil.

Etanol akan diproduksi dari bahan baku singkong dan tebu, dengan potensi tambahan dari sorgum dan aren, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Murza, menjelaskan bahwa kebijakan E5 dan E10 berpotensi mengurangi ketergantungan impor BBM hingga Rp200 triliun.

"Negara seperti India dan Brasil sudah membuktikan keberhasilan program bioetanol. Indonesia punya potensi besar mengikuti jejak itu," ujar Oki.

Tantangan Penyediaan Bahan Baku

Pengamat energi dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai tantangan utama dalam program transisi energi ini adalah ketersediaan bahan baku.

Menurutnya, bahan baku untuk biodiesel relatif aman karena pasokan minyak kelapa sawit melimpah. Namun, untuk bioetanol, tantangan lebih besar karena bergantung pada produksi tanaman pangan seperti tebu dan singkong.

"Kalau bahan baku belum tersedia dan akhirnya harus impor, justru bisa lebih mahal dari impor BBM itu sendiri," jelas Komaidi.

Ia menyarankan pemerintah untuk memetakan ketersediaan bahan baku secara nasional agar program energi hijau bisa berjalan seimbang tanpa menimbulkan tekanan baru terhadap ketahanan pangan.

Terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia akan memangkas 5,3 juta ton ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada 2026 guna menyokong program mandatori biodiesel B50.

Amran mengatakan produksi CPO Indonesia mencapai sekitar 46 juta ton/tahun, tetapi hanya 20 juta ton yang digunakan untuk diproses di dalam negeri. Adapun, 26 juta ton lainnya masih dijual untuk pasar ekspor.

"[Dalam kaitan itu,] B50 membutuhkan CPO 5,3 juta ton. Ekspor ini nantinya kita tarik 5,3 juta ton, kemudian dijadikan biofuel, dijadikan pengganti solar," kata Amran di kompleks istana kepresidenan, Kamis (9/10/2025). (wid,rls,bis/dya)

Dinas Kelautan & Perikanan
Provinsi Jawa Timur

MENGUCAPKAN
SELAMAT HARI JADI
PROVINSI
JAWA TIMUR
12 OKTOBER 1945 - 12 OKTOBER 2025

Tahun
JAWA TIMUR
JATIM TANGGUH TERUS BERTUMBUH

Dr Ir Muhammad Isa Anshori, ATD., MT
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Pemkab Malang Guyur Rp57 M untuk Guru Non-ASN, Bertahap hingga Desember

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengucurkan anggaran sekitar Rp57 miliar untuk insentif guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) sepanjang tahun 2025.

Penyaluran sebesar Rp500 ribu per bulan itu dilakukan secara bertahap. Mulai Januari hingga Desember mendatang, dengan sebagian besar tahap telah tersalurkan hingga Agustus 2025.

"Saya gak hafal, ya yang sudah tersalurkan berapa. Tetapi 3 bulan terakhir ini sudah tersalurkan. Dari 12 bulan, itu per bulannya mereka mendapatkan Rp500 ribu, itu untuk guru non ASN yang berada di sekolah negeri maupun swasta," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadi, dikutip pada Kamis (9/10/2025).

Disebutkannya, penyaluran insentif dilakukan secara bertahap. Tahap pertama telah diberikan untuk periode Januari hingga Mei. Sementara tahap berikutnya, yakni untuk bulan Juni sampai Agustus, juga telah tersalurkan.

Untuk bulan September dan Oktober, menurut Suwadi,

penyalurannya digabung dalam satu tahap. Sedangkan insentif bulan November dan Desember akan dicairkan pada tahap akhir tahun.

"Kalau totalnya sekitar Rp57 miliar, kalau tidak salah. Mungkin November-Desember nanti akan jadi satu," jelasnya.

Suwadi menambahkan, penetapan penerima insentif didasarkan pada hasil pendataan guru yang telah dilakukan sejak 2021. Guru-guru yang berstatus sebagai guru tidak tetap (GTT) dan masuk dalam database non-ASN berhak menerima insentif tersebut.

Namun, lanjutnya, bagi tenaga pendidik yang belum masuk data non-ASN tetapi telah lama mengabdikan, tetap dimungkinkan menerima insentif secara bertahap. Sesuai kemampuan anggaran dan kuota yang tersedia.

"Kalau yang sudah masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu sudah tidak dapat. Jadi kuotanya bisa kami geser ke yang sudah mengabdikan lama, meskipun belum masuk database non-ASN," katanya.

Lebih lanjut, berdasarkan data Dinas Pendidikan, hingga saat ini

masih terdapat sekitar 3.000 guru non-ASN yang aktif mengajar di Kabupaten Malang.

Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak rekrutmen tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan, Suwadi menyebut kebutuhan terhadap GTT di sektor pendidikan tidak bisa dihindari.

Menurutnya, kekosongan tenaga pengajar akibat pensiun atau mutasi harus segera diisi. Agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Karena itu, sekolah diberikan kewenangan untuk mengangkat GTT sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

"Misalnya, kalau ada guru fisika pensiun, kemudian kosong, kalau tidak segera diisi bagaimana? Makanya kami tetap mengangkat GTT untuk mengisi kekosongan. Ada kebijakan tersendiri



untuk mengangkat GTT oleh sekolah yang bersangkutan," ungkapnya.

Suwadi memastikan, pengangkatan GTT tidak menyebabkan tumpang tindih beban kerja dengan guru tetap. Sekolah wajib mengatur jam mengajar agar tidak memengaruhi pemenuhan jam Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru definitif. (Santi/Dya)

Digeber 2026, Program Rp50 Juta/RT di Kota Malang Berkonsep Kegiatan Tematik



berjalan pada tahun 2026. Dengan konsep kegiatan tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

"Iya, itu kan program unggulannya Pak Wali dan Wakil Wali Kota Malang. Ada lima program prioritas, tinggal satu itu yang belum jalan. Pak wali menghendaki tahun 2026 nanti sudah bisa berjalan," ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, Kamis (9/10/2025).

Ditegaskannya, percepatan penyusunan Perwal penting dilakukan, agar tahapan perencanaan dan penganggaran tidak mundur. Jika proses tersebut tidak segera selesai, maka pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Khusus (Musrensus) juga akan tertunda.

Dwi menyebut, saat ini Perwali tersebut sedang berada di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk proses mendapatkan nomor registrasi (nereg). Setelah memperoleh nomor registrasi, peraturan itu akan segera diundangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan di minggu ini sudah bisa selesai. Kalau tidak, Musrensus jadi mundur-mundur juga. Kami kejar supaya bisa masuk di RAPBD karena pelaksanaannya di tahun anggaran 2026," lanjutnya.

Untuk diketahui, program Rp50 juta per RT merupakan salah satu dari lima janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin.

Dari kelima program prioritas yang dicanangkan, empat di antaranya telah terealisasi lebih dahulu, yakni program beasiswa pendidikan, seragam sekolah

gratis, penyelenggaraan 1.000 event, serta penanganan masalah perkotaan seperti banjir dan kemacetan.

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, perencanaan untuk tahun anggaran 2026 sebenarnya telah selesai dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, program Rp50 juta per RT akan dimasukkan melalui mekanisme khusus setelah Perwal selesai dan diundangkan.

Setelah itu, program akan diintegrasikan ke dalam rencana kerja perangkat daerah (renja). "Mekanismenya tetap usulan dari RT, karena yang tahu kebutuhannya kan di RT masing-masing. Tapi bisa jadi tidak seluruh RT mengusulkan, sesuai kebutuhan," terangnya.

Ditambahkannya, proses pengusulan tetap akan dilakukan secara partisipatif seperti Musrenbang reguler. Masyarakat diharapkan benar-benar mengajukan usulan berdasarkan kebutuhan nyata di wilayahnya masing-masing. (Santi/Dya)

FASE I DAMAI DISETUJUI: HAMAS-ISRAEL TUKAR TAHANAN DAN GENJATAN SENJATA 2 TAHUN

Setelah dua tahun konflik berdarah yang menewaskan lebih dari 65 ribu warga Gaza, sebagian besar adalah penduduk sipil, Hamas dan Israel akhirnya mencapai kesepakatan fase pertama perjanjian damai beserta gencatan senjata di Jalur Gaza



Kerabat dan pendukung sandera Israel yang ditawan Hamas di Jalur Gaza merayakan kemenangan setelah pengumuman bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui tahap pertama rencana perdamaian, saat mereka berkumpul di sebuah plaza yang dikenal sebagai Alun-alun Sandera di Tel Aviv, Israel, Kamis, (9/10/2025). (Foto AP)

Pengumuman bersejarah ini dilakukan pada Kamis (9/10/2025) setelah melalui serangkaian negosiasi intensif di Mesir, dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berperan sebagai inisiator utama dari inisiatif perdamaian tersebut. Selain Mesir, Qatar juga ikut berperan sebagai mediator dalam proses perundingan.

Trump dalam konferensi pers di Washington menyebutkan bahwa kesepakatan awal ini menjadi langkah pertama menuju perdamaian yang kuat dan abadi di Timur Tengah. "Israel dan Hamas telah menandatangani rencana damai tahap pertama. Semua sandera akan segera dibebaskan dan pasukan Israel akan mundur ke garis yang telah disepakati," ujar Trump dikutip dari AFP, Kamis (8/10/2025).

Menurut pejabat Hamas, fase awal kesepakatan mencakup pertukaran tahanan dan sandera. Dalam perjanjian ini, Hamas akan membebaskan 20 sandera Israel yang masih berada di Gaza, sementara pemerintah Israel akan melepaskan 2.000 tahanan Palestina, termasuk 250 narapidana yang sebelumnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Proses pertukaran dijadwalkan berlangsung dalam 72 jam setelah penandatanganan kesepakatan, dan Presiden Trump menyebut kemungkinan proses pembebasan dimulai pada Senin, 13 Oktober 2025.

Selain itu, Israel berjanji untuk menarik pasukannya dari garis depan di Gaza dan membuka akses bagi 400

truk bantuan kemanusiaan per hari selama lima hari pertama setelah kesepakatan berlaku. Jumlah truk bantuan ini akan ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan penduduk setempat.

Tahap berikutnya, warga Gaza yang mengungsi selama dua tahun akibat serangan udara dan operasi

militer Israel akan diperbolehkan kembali ke rumah mereka masing-masing.

Dukungan Internasional

Kesepakatan ini diumumkan beberapa hari setelah memperingati dua tahun pecahnya perang Gaza pada 7 Oktober 2023. Konflik yang berlangsung lama tersebut telah merusak sebagian besar infrastruktur Gaza dan memicu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah wilayah itu.

Pihak Qatar menyatakan harapannya bahwa fase pertama kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju

perdamaian permanen. "Kedua belah pihak telah menunjukkan niat baik. Kami berharap fase ini benar-benar mengakhiri penderitaan rakyat Gaza," kata perwakilan Qatar yang dikutip oleh Reuters.

Sementara itu, di Gaza Selatan, momen pembebasan tahanan Palestina berlangsung dengan suasana penuh haru. Seorang mantan narapidana terlihat memeluk erat anaknya setelah dibebaskan dari penjara Israel, menjadi simbol kecil dari harapan besar akan perdamaian yang mulai muncul di tengah reruntuhan akibat perang. (AFP, Reuters, ist/nei)

Poin Utama Kesepakatan Fase I

Aspek	Keterangan
Pertukaran Tahanan	Hamas-Israel tukar 20 sandera dengan 2.000 tahanan.
Gencatan Senjata	Hentikan permusuhan 2 tahun
Penarikan Pasukan	Israel tarik pasukan dari Gaza
Bantuan Kemanusiaan	400 truk bantuan per hari masuk Gaza

Indonesia Dukung Two-State Solution

Menlu Sugiono kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap penerapan solusi dua negara (two-state solution). Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan disahkannya fase pertama kesepakatan damai di Gaza antara Hamas dan Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono saat bertemu dengan Menlu Belanda, David van Weel, di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025). Sugiono menegaskan bahwa seperti Belanda, Indonesia juga mendukung penuh penerapan two-state solution sebagai solusi bagi krisis Israel-Palestina.

"Kami juga membahas situasi di Palestina dan kami berdua berada dalam kesepakatan yaitu sama-sama mendukung two-state solution," ucap Sugiono.

"Indonesia menekankan seruan penghentian segera malapetaka krisis kemanusiaan di Gaza," ucap

Sugiono.

Two-state solution berarti Palestina dan Israel masing-masing menjadi negara merdeka dan berdaulat yang hidup berdampingan secara damai, dengan batas wilayah Palestina berdasarkan Garis 4 Juni 1967 (Green Line), meliputi Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Sementara itu, Menlu Belanda, van Weel, saat bertemu Sugiono, menyinggung fase pertama perdamaian Israel-Palestina yang telah terwujud. Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai momen bersejarah yang berpotensi membawa stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah.

Sebelumnya, dukungan Indonesia terhadap two-state solution juga disampaikan oleh Presiden Prabowo saat berada di markas besar PBB di New York pada



Menlu Sugiono (Foto: Antara)

akhir September lalu.

"Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, maka Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan mendukung segala jaminan bagi keamanan Israel," ujar Prabowo. (nei,rls/dya)

Camilan Sehat Pereda Pegal dan Pusing Setelah Pulang Kerja

Siapa pun bisa mengalami pegal dan pusing setelah seharian bekerja, baik karena terlalu lama berdiri, banyak bergerak, mengangkat beban berat, maupun duduk terus di depan layar. Meski aktivitasnya berbeda, hasilnya sering sama tubuh terasa kaku, kepala berat, dan energi seolah terkuras habis.

Kondisi tersebut bukan sekadar tanda kelelahan biasa. Tubuh sebenarnya sedang memberikan sinyal adanya ketidakseimbangan dalam sirkulasi darah, cairan, atau asupan energi. Untuk mengatasinya, tidak cukup hanya dengan beristirahat atau dipijat, tetapi juga perlu dukungan dari asupan makanan ringan yang tepat.

Beberapa jenis camilan terbukti dapat membantu proses pemulihan tubuh dengan memperlancar aliran darah, menstabilkan kadar gula, serta menurunkan kadar hormon stres.

Beberapa penyebab pegal dan pusing sepuluh kerja antara lain sebagai berikut:

Aktivitas Berlebihan atau Terlalu Banyak Diam

Terlalu banyak duduk maupun berdiri dalam waktu lama dapat menghambat sirkulasi darah ke otot. Ketika aliran darah tidak lancar, pasokan oksigen ke jaringan otot berkurang, sehingga tubuh mulai merasakan nyeri, kaku, dan cepat lelah. Kondisi ini sering dialami oleh pekerja kantoran maupun mereka yang bekerja dalam posisi statis sepanjang hari.

Selain itu, berdiri terlalu lama saat dalam perjalanan pulang kerja juga bisa memicu gangguan muskuloskeletal, yaitu keluhan pada otot, sendi, atau tulang akibat posisi tubuh yang tidak seimbang.

Sebuah studi dalam *Jurnal Gait & Posture* tahun 2017 mengungkapkan bahwa duduk dalam waktu lama dapat membuat otot menjadi kaku dan meningkatkan risiko rasa pegal di bagian punggung, leher, serta bahu. Gangguan aliran

darah yang terjadi bukan hanya berdampak pada otot, tetapi juga pada otak. Ketika suplai oksigen ke otak menurun, seseorang dapat merasa pusing, kepala terasa berat, bahkan berkunang-kunang.

Dehidrasi Ringan

Bekerja di luar ruangan dengan paparan panas, atau sebaliknya di ruangan ber-AC dalam waktu lama, dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan tanpa disadari. Kondisi ini sering terjadi karena tubuh tetap mengeluarkan keringat atau uap air melalui pernapasan meski tidak terasa, sehingga kadar cairan menurun perlahan.

Kehilangan air meskipun hanya 1-2 persen dari berat badan sudah dapat memengaruhi fungsi tubuh secara signifikan. Dampaknya antara lain penurunan konsentrasi, munculnya sakit kepala, serta meningkatnya rasa lelah. Tubuh yang kekurangan cairan juga akan lebih sulit mempertahankan suhu normal, sehingga seseorang mudah merasa lesu atau tidak fokus.

Penelitian yang dimuat dalam *Journal of the American College of Nutrition* tahun 2012 menegaskan bahwa dehidrasi ringan memiliki dampak langsung terhadap kinerja kognitif dan kondisi fisik.

Gula Darah Menurun

Banyak orang melewati waktu makan karena sibuk bekerja. Akibatnya, kadar gula darah turun dan otak kekurangan energi untuk berpikir jernih. Studi di *Blood Glucose Levels* (2019) menjelaskan bahwa

hipoglikemia ringan dapat memicu pusing, gemetar, dan lemas, gejala yang sering disalahartikan sebagai "capek biasa".

Ketegangan Otot dan Mata

Bagi pekerja yang sering menatap layar, menunduk, atau memfokuskan pandangan terlalu lama, ketegangan pada otot leher dan mata kerap terjadi akibat posisi yang statis dan kurang relaksasi. Hal serupa juga dialami oleh pekerja lapangan yang melakukan gerakan berulang atau mempertahankan posisi tubuh yang sama dalam waktu lama, sehingga otot menjadi kaku dan mudah lelah.

Kekurangan Mineral

Mineral penting untuk menjaga fungsi otot dan saraf, apalagi orang-orang yang sudah seharian bekerja. Bila tubuh kekurangan magnesium dan kalium, akibat pola makan tidak seimbang atau jarang mengonsumsi buah dan kacang-kacangan, otot akan sulit rileks, memicu rasa pegal dan kram.

Camilan Pemulih

Setelah memahami berbagai penyebab rasa pegal dan pusing, saatnya membantu tubuh pulih dengan asupan ringan namun efektif. Ada empat jenis camilan yang dapat mempercepat pemulihan energi, melancarkan sirkulasi darah, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan kepala kembali ringan.

Cokelat Hitam

Cokelat hitam dengan kadar kakao di atas 70% bukan hanya enak, tapi juga kaya magnesium dan flavonoid yang bantu relaksasi otot serta melancarkan aliran darah ke otak. Penelitian yang terbit di *Jurnal Frontiers in Nutrition* 2017 mencatat bahwa konsumsi flavonoid dari kakao mampu meningkatkan aliran darah serebral dan menurunkan ketegangan otot kepala. Cukup 1-2 potong kecil setelah kerja.

Rasanya mungkin sedikit pahit, tapi efeknya

a bisa bantu tubuh lebih tenang dan otot terasa rileks.

Kacang Almond

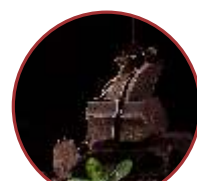
Almond mengandung protein, lemak sehat, kalsium, fosfor, kalium, dan magnesium adalah kombinasi ideal untuk menjaga energi tetap stabil dan mencegah otot kaku. Telah banyak studi ilmiah yang menunjukkan bukti bahwa almond dapat menurunkan kelelahan otot dan kram setelah aktivitas panjang.

Pisang

Pisang kaya kalium dan karbohidrat kompleks yang bantu mengembalikan energi setelah lelah bekerja sekaligus menyeimbangkan elektrolit tubuh. Konsumsi pisang memiliki efek pemulihan otot dan menjaga performa otot, terbukti salah satunya dalam penelitian yang dipublikasi di *Innovative Journal of Medical and Health Science*. Selain mudah didapat, pisang juga lembut di lambung, cocok buat kamu yang belum sempat makan berat.

Alpukat

Alpukat kaya kalium, magnesium, dan lemak tak jenuh tunggal yang bantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh serta memperlancar sirkulasi darah. Alpukat juga bisa membantu menghilangkan sakit kepala yang biasa muncul setelah bekerja karena kandungan vitamin B kompleks dan antioksidan, sehingga pikiran terasa lebih jernih dan rileks. (nei,ist/dya)



Coklat Hitam



Almond



Alpukat



Pisang

AI Ungkap Manusia Purba Pernah Dimangsa Macan Tutul

Sekitar dua juta tahun lalu, kehidupan di Afrika Timur bukan hanya penuh tantangan, tetapi juga sarat bahaya. Studi terbaru mengungkap bahwa nenek moyang manusia purba, khususnya spesies Homo habilis, kemungkinan besar pernah menjadi mangsa macan tutul.

Riset yang diterbitkan pada 16 September 2025 di jurnal Annals of the New York Academy of Sciences ini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis fosil manusia purba. Temuan tersebut mengungkap kisah tragis dua individu H. habilis, salah satu spesies awal dari genus Homo — kelompok yang kelak menurunkan manusia modern.

Selama ini, para ilmuwan telah menduga bahwa Homo habilis kerap menjadi korban serangan hewan buas seperti singa, buaya, atau macan tutul. Dugaan tersebut muncul karena ditemukannya bekas gigitan pada sejumlah fosil tulang, meski sulit memastikan hewan mana yang benar-benar menjadi pelakunya.

Hal ini terjadi karena metode konvensional, seperti pemeriksaan fisik tulang, tidak mampu memberikan detail cukup untuk membedakan pola gigitan antarspesies. Akibatnya, sebagian besar penelitian hanya menghasilkan kesimpulan umum tanpa identifikasi yang pasti.

Kini, berkat bantuan kecerdasan buatan (AI), para peneliti akhirnya mampu menentukan pelaku dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

"AI telah membuka pintu baru dalam memahami masa lalu," ujar Profesor Manuel Domínguez-Rodrigo, arkeolog prasejarah dari University of Alcalá, Spanyol, sekaligus profesor tamu antropologi di Rice University, Texas. Domínguez-Rodrigo bersama

tim penelitiannya meneliti dua fosil Homo habilis, yaitu OH 7 individu muda yang hidup sekitar 1,85 juta tahun lalu dan OH 65, individu dewasa berusia sekitar 1,8 juta tahun.

Kedua spesimen tersebut ditemukan beberapa dekade silam di Ngarai Olduvai, Tanzania, yang dikenal sebagai salah satu situs paling bersejarah dalam studi evolusi manusia.

"Kami memilih dua fosil ini karena keduanya paling jelas diidentifikasi sebagai H. habilis dan juga paling terawat," jelas Domínguez-Rodrigo, dikutip Live Science.

Dari hasil pemeriksaan awal, tim peneliti menemukan jejak gigitan hewan pemangsa pada rahang bawah individu muda dan rahang atas individu dewasa—bekas yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi. Untuk memverifikasi temuan tersebut, mereka memanfaatkan teknologi computer vision berbasis kecerdasan buatan (AI).

Model AI tersebut dilatih dengan ratusan contoh bekas gigitan dari hewan karnivora modern seperti hiena, buaya, dan macan tutul. Dalam uji blind test, model terbaik mampu mengidentifikasi jenis hewan berdasarkan pola gigitan dengan tingkat akurasi lebih dari 90 persen.

Saat diterapkan pada fosil OH 7 dan OH 65, hasil analisis menunjukkan bahwa bekas gigitan tersebut berasal dari macan tutul.

Temuan ini, ditambah bukti fisik lainnya, memperkuat dugaan bahwa kedua individu H.

habilis itu bukan hanya diserang, melainkan benar-benar menjadi santapan predator tersebut.

"Fakta bahwa hanya sedikit bagian kerangka yang tersisa menunjukkan tingkat kerusakan yang sangat tinggi," kata Domínguez-Rodrigo. "Jika ada pemangsa lain yang lebih dulu memangsa mereka, macan tutul tidak akan tertarik lagi, karena hewan ini hanya memakan daging segar."

Dengan kata lain, macan tutul diduga kuat menjadi predator utama sekaligus yang pertama memangsa kedua individu manusia purba tersebut.

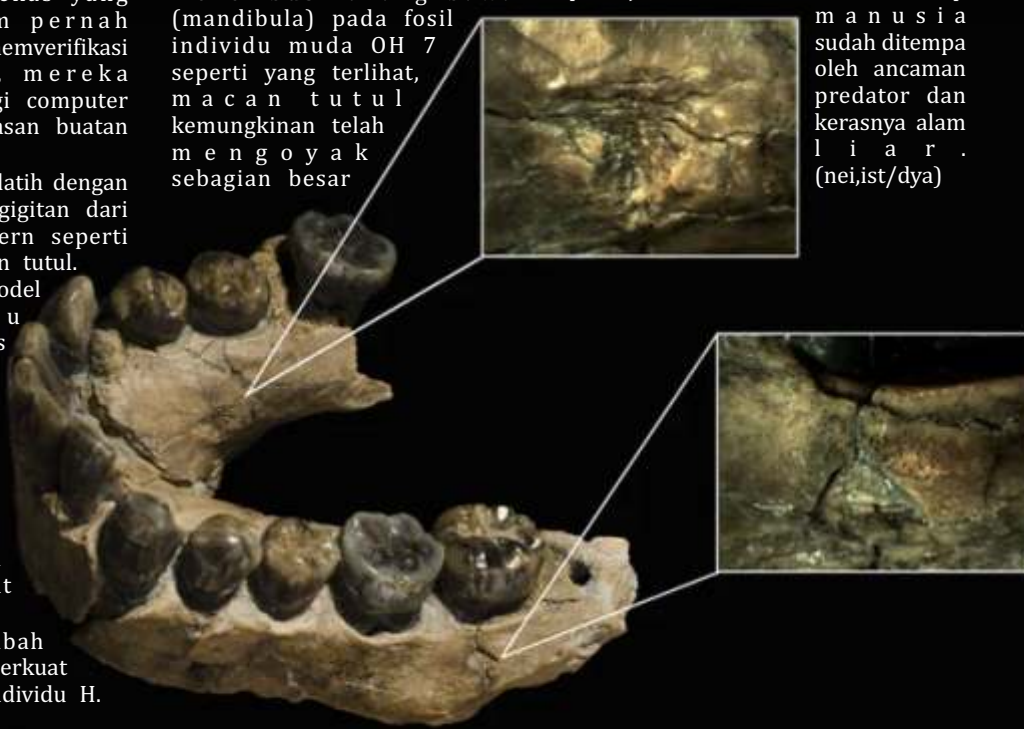
Domínguez-Rodrigo menjelaskan bahwa untuk menembus rahang bawah (mandibula) pada fosil individu muda OH 7 seperti yang terlihat, macan tutul kemungkinan telah mengoyak sebagian besar

jaringan daging dan lidah korban terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa serangan itu bukan sekadar untuk melumpuhkan, tetapi benar-benar bertujuan untuk memakan seluruh tubuh mangsanya. "Ini jelas bukti konsumsi, bukan sekadar gigitan untuk membunuh," tegasnya.

Temuan ini menjadi pengingat bahwa jauh sebelum manusia mendominasi alam, kita pernah berada di posisi yang rentan sebagai mangsa. Pada masa itu, setiap langkah keluar dari tempat berlindung bisa berujung pada pertarungan antara hidup dan mati.

Kini, berkat kecanggihan teknologi AI, para ilmuwan dapat menelusuri masa lalu dengan lebih jelas, mengungkap bahwa sejak zaman prasejarah, naluri bertahan hidup

manusia sudah ditempa oleh ancaman predator dan kerasnya alam liar. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Gunung Tempat Nabi Musa Terima Wahyu Akan Diubah Jadi Resor Mewah

Gunung Sinai, yang dikenal sebagai salah satu destinasi spiritual paling bersejarah di dunia, kini menjadi perhatian publik. Pasalnya, gunung yang diyakini sebagai tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT tersebut akan diubah menjadi kawasan resor mewah.

Menurut laporan New York Post, keberadaan Gunung Sinai terancam akibat peluncuran Great Transfiguration Project (GPP) oleh pemerintah Mesir. Proyek besar ini mencakup pembangunan lima hotel, ratusan vila, serta area perbelanjaan modern yang menjadi bagian dari rencana pengembangan pariwisata berskala besar di wilayah suci tersebut. Proyek ambisius ini ditargetkan rampung pada 2026, dan diklaim sebagai "hadiah bagi dunia dan semua agama", sebagaimana laporan BBC.

Destinasi Spiritual dan Warisan Dunia

Selama berabad-abad, Gunung Sinai telah menarik perhatian para peziarah dan wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alamnya serta mengenal lebih dekat budaya tradisional Suku Bedouin.

Selain pesona alam gurunya yang memukau, kawasan ini juga menjadi lokasi Biara St. Catherine yang telah berdiri sejak abad ke-6. Biara tersebut dikenal sebagai salah satu yang tertua di dunia dan masih aktif hingga saat ini, serta telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 2002.

Suku Bedouin Jebelnya, yang selama berabad-abad berperan sebagai penjaga Biara St. Catherine sekaligus pemandu wisata, kini disebut sebagai kelompok yang paling terancam oleh proyek tersebut. Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa rumah dan kamp wisata milik mereka telah digusur tanpa pemberian kompensasi, bahkan terdapat kasus pemindahan makam untuk memberi ruang bagi pembangunan area parkir baru.

"Ini bukan pembangunan yang diinginkan masyarakat lokal,

melainkan proyek top-down untuk kepentingan pihak luar," ujar penulis perjalanan Inggris, Ben Hoffer, yang lama bekerja sama dengan Suku Bedouin. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa peluang kerja dari pembangunan resor tersebut justru akan lebih banyak diberikan kepada warga Mesir dari wilayah Lembah Nil, bukan kepada penduduk lokal Sinai.

Sorotan Dunia

Proyek ini tidak hanya memicu gelombang protes dari masyarakat lokal, tetapi juga menimbulkan ketegangan di ranah diplomatik. Pemerintah Yunani secara terbuka menolak pembangunan tersebut karena lokasinya berkaitan erat dengan Biara St. Catherine yang bernaung di bawah Gereja Ortodoks Yunani.

Ketegangan semakin meningkat setelah pengadilan Mesir memutuskan bahwa lahan tempat biara berdiri merupakan milik negara. Namun, melalui pertemuan diplomatik terbaru, kedua pihak mencapai kesepakatan bahwa identitas Ortodoks Yunani serta warisan budaya Biara St. Catherine akan tetap dijaga dan dilindungi.

Daya Tarik Wisata

Selain itu, Gunung Sinai tidak hanya menjadi tujuan ziarah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi, Gunung Sinai juga menjadi destinasi wisata spiritual yang menarik perhatian para pelancong dari seluruh dunia karena keindahan alam dan nilai sejarahnya.

Nilai Religius dan Sejarah yang Kuat

Gunung Sinai merupakan tempat yang disebut dalam Kitab Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Gunung ini diyakini sebagai lokasi di mana Nabi Musa berbicara langsung dengan Tuhan, menjadikannya salah satu tempat paling suci dalam sejarah keagamaan dunia. Karena peristiwa sakral tersebut,

Gunung Sinai memiliki makna spiritual yang mendalam bagi tiga agama besar monoteistik: Yahudi, Kristen, dan Islam. Hingga kini, kawasan ini tetap menjadi tujuan ziarah lintas keyakinan dan simbol pertemuan antara manusia dengan Sang Pencipta.

Keindahan Alam dan Pemandangan Sunrise

Pendakian menuju puncak Gunung Sinai umumnya dimulai pada tengah malam. Hal ini dilakukan agar para wisatawan dan peziarah dapat tiba di puncak tepat saat matahari mulai terbit dari ketinggian 2.285 meter di atas permukaan laut. Perjalanan ini bukan sekadar pendakian fisik, tetapi juga menjadi bagian dari ritual spiritual bagi banyak orang yang ingin merasakan kedamaian di tempat yang penuh makna religius.

Saat fajar menyingsing, pemandang matahari terbit di atas Gunung Sinai menghadirkan suasana yang begitu magis dan menenangkan. Cahaya keemasan yang perlahan menyelimuti pegunungan menciptakan pengalaman visual dan spiritual yang luar biasa, membuat siapa pun yang menyaksikannya merasakan kedekatan dengan alam dan Sang Pencipta.

Biara St. Catherine

Di kaki Gunung Sinai berdiri Biara St. Catherine, salah satu biara tertua di dunia yang masih aktif hingga saat ini. Biara ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi, menjadi saksi perjalanan panjang keagamaan di kawasan tersebut. Didirikan pada abad ke-6 oleh Kaisar Yustinianus I, biara ini menjadi pusat kehidupan rohani bagi para biarawan Ortodoks Timur.

Selain arsitekturnya yang megah dan kokoh, Biara St. Catherine juga menyimpan koleksi manuskrip kuno serta ikonografi penting yang memiliki nilai budaya dan religius tak ternilai. Tempat ini juga diyakini berdiri di dekat lokasi "Burning Bush" semak yang terbakar tanpa hangus sebagaimana diceritakan dalam kisah Nabi Musa menjadikannya salah satu

situs paling suci dan dihormati di dunia.

Formasi Geologi Unik

Gunung Sinai memiliki formasi batuan granit berwarna merah muda yang khas, menciptakan pemandangan alam yang unik dan memukau. Di sekelilingnya terbentang jajaran pegunungan gersang yang menjulang, menghadirkan kesan agung sekaligus sunyi. Kombinasi warna batu, cahaya matahari, dan kontur bebatuan memberikan nuansa dramatis yang menambah pesona gunung ini.

Keindahan lanskap Gunung Sinai tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memperkaya pengalaman spiritual bagi setiap pendaki dan peziarah. Pemandangan alam yang megah dan tenang ini seolah menjadi latar sempurna bagi perjalanan batin, di mana keheningan dan keindahan berpadu menciptakan makna yang mendalam. (nei,ist/dya)



Atur Strategi Buru ...dari hal 1

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan pihaknya telah mempercepat penagihan ini dengan memperluas kerja sama antar lembaga. Kerja sama ini dilakukan untuk melakukan asset tracing atau penelusuran aset.

"Kita kerja sama untuk asset tracing, kita kerjasama untuk penagihan aktif dengan beberapa institusi seperti Kejaksaan Agung. Kita juga melakukan sinergi yang cukup signifikan gitu ya, strategis dengan beberapa instansi sebagai penyedia informasi seperti dengan OJK," kata Bimo, di kantor pusat Ditjen Pajak Kemenkeu dilansir cncindonesia, Kamis (9/10/2025).

Sebenarnya, data 200 penunggak pajak sudah ada di meja. Namun, eksekusi penagihan tetap dilakukan oleh kantor wilayah (kanwil). Meski demikian, dia mengatakan memberikan diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang pajak pada mereka yang patuh membayar dan berkomitmen.

"Nah dari 200 itu, tindakan penagihan aktif yang membuat mereka bisa melakukan pembayaran dan komit, itu tentu kita berikan kesempatan untuk bisa mengutarakan rencana restrukturisasi utang pajaknya," tegasnya.

Tentunya, restrukturisasi ini tetap berdasarkan jaminan, yakni Ditjen Pajak tetap menyita asetnya dan memblokir rekeningnya. Jika tidak kooperatif lagi, Ditjen Pajak akan melakukan pencekalalan.

Bimo menegaskan Ditjen Pajak tidak akan segan-segan menaikkan kasus 200 penunggak pajak ini ke ranah hukum jika tidak kooperatif, sesuai dengan keputusan yang sudah inkrah. "Bahkan nanti kalau memang perlu dengan tindakan yang sangat pemindaan melalui gijzeling, paksa badan," ujarnya.

Bimo juga memberikan ultimatum dengan mengambil langkah hukum, termasuk penyitaan aset jika pelaku tidak kooperatif. Ultimatum tersebut, kata Bimo, merujuk kepada 200 wajib pajak (WP) pribadi maupun korporasi penunggak pajak yang sebelumnya diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kami juga tidak segan-segan untuk menaikkan ke ranah penegakkan hukum apabila memang tidak bisa kooperatif sesuai dengan keputusan yang sudah inkrah," ujar Bimo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, dilansir Bloomberg Kamis (9/10/2025).

Bimo mengatakan, jumlah tersebut sebetulnya hanya laporan yang telah diterima oleh otoritas pajak negara. Dia memastikan angka akan terus bertambah seiring upaya yang terus dilakukan oleh Kantor Pajak masing-masing wilayah.

Dia pun meminta para

pengemplang pajak itu untuk kooperatif dan komitmen untuk membayar kewajiban. Pemerintah juga sangat terbuka jika ada langkah restrukturisasi dan itikad baik untuk pelunasan.

"Tapi dengan jaminan, kita sita asetnya, kemudian kita blokir rekeningnya. Apabila tidak kooperatif lagi, kita akan lakukan pencekalalan," tutur dia.

"Bahkan nanti kalau perlu dengan tindakan pemidanaan melalui gijzeling [penyanderaan]. Aset nanti akan kami sita dalam jangka waktu tertentu, kalau sudah tidak, akan kami lakukan pelelangan," katanya.

Menkeu Purbaya berharap ratusan penunggak pajak, baik dari Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Perusahaan harus membayar sisa kewajibannya hingga akhir 2025.

Titah tersebut merujuk pada sekitar 200 orang penunggak pajak besar, yang berasal dari sengketa pengadilan yang telah inkrah dan dimenangkan oleh pemerintah. Total nilai tunggaknya sekitar Rp200 triliun.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan nilai nominal dari 200 penunggak pajak tersebut mencapai hingga Rp50 triliun. Namun, hingga saat ini hanya baru terbayarkan sebesar Rp7 triliun. "Sekarang baru hampir Rp7 triliun, tetapi pembayarannya kayaknya ada yang bertahap," ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dia pun berharap para penunggak pajak itu harus membayar sisa kewajibannya hingga akhir 2025. Purbaya memastikan otoritas pajak negara akan terus memburu para penunggak pajak tersebut.

Hanya saja, hingga saat ini, Purbaya mengatakan total tunggakan pajak tersebut baru diterima pemerintah senilai Rp7 triliun, naik sedikit dari laporan per akhir September lalu yang masih sebesar Rp5,1 triliun.

Purbaya belum bisa memastikan akan memberikan sanksi apa kepada para penunggak pajak tersebut jika tak kunjung bayar. Permasalahan itu, kata dia, mesti dibicarakan dulu dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Purbaya memastikan otoritas pajak negara akan terus memburu para penunggak pajak tersebut. "Kami juga akan melakukan penegakan hukum yang serius, untuk [wajib pajak/WP] non-compliance, dengan bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan, hingga Polisi," tutur dia, belum lama ini.

Realisasi Penerimaan Pajak

Adapun realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.135,4 triliun per Agustus 2025. Angka itu 54,7% dari target APBN yang dipatok senilai Rp2.076 triliun. Penerimaan itu turun 5,1% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.196,5 triliun.

Sedangkan, Penerimaan pajak bruto kumulatif bulan Januari - Agustus 2025 tumbuh 2,1% menjadi Rp 1.442,7 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.413,4 triliun.

Menkeu Purbaya mengungkapkan realisasi pendapatan negara sampai 31 Agustus 2025 tercatat Rp1.638,7 triliun atau merosot 7,8% dibanding realisasi pendapatan negara periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1.777,3 triliun. Berdasarkan porsinya, nominal ini baru 57,2% dari target terbaru 2025, yakni Rp1.865,5 triliun.

Rincian pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan yang sebesar Rp1.330,4 triliun, atau merosot 3,6% secara tahunan (year-on-year/yoy). Porsinya baru 55,7% dari target Rp2.387,3 triliun.

Selain penerimaan perpajakan, pemerintah juga membukukan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sebesar Rp306,8 triliun. Angka ini merosot 20,1% dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Menurut porsinya, angka ini tercatat 64,3% dari target yang mencapai Rp477,2 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor ketenagalistrikan, pertambangan bijih logam, perdagangan online dan perdagangan besar hingga pertanian tanaman.

Pendapatan negara per Agustus 31 adalah 57,2%. Sedangkan penerimaan pajak 54,7% sehingga tidak terlalu jauh dari average cukai 62,8% dan PNBPNP 64,3%.

Namun, jika dilihat lebih lanjut secara neto, penerimaan pajak totalnya mencapai Rp 1.135,44 triliun. Pendapatan neto ini didapatkan setelah dikurangi oleh restitusi. Secara bruto konsisten sejak Maret mengalami pertumbuhan yang positif, kalau neto angkanya 54,7% dibandingkan dengan outlook.

Namun, penerimaan neto pajak pada bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 3,8%. Anggito menuturkan penurunan ini dipicu oleh faktor restitusi. "Jadi akan selalu ada faktor korelasi antara penerimaan bruto dan neto," tegas Anggito.

Adapun, secara bruto, PPh Badan kenaikan sebesar 7,5% menjadi Rp 280,08 triliun. Namun, secara neto, besaran PPh Badan ini turun menjadi Rp 194,20 triliun atau minus 8,7%.

Kemudian, PPh Orang Pribadi mengalami kenaikan baik secara bruto dan neto, yakni masing-masing Rp 15,98 triliun dan Rp 15,91 triliun. Capaian bruto dan neto ini meningkat masing-masing sebesar 38,8% dan 39,1%.

Lebih lanjut, PPN & PPnBM secara bruto mengalami penurunan 0,7% menjadi Rp 631,8 triliun. Sementara itu, PPN & PPnBM secara neto juga turun 11,5% menjadi Rp 416,49 triliun. "Untuk yang netonya itu ada koreksi dari restitusi," ungkap Anggito.

Sementara itu, realisasi bea cukai tercatat mencapai Rp194,9 triliun atau

meningkat 6,4% yoy. Porsinya melampaui 62,8% dari target 2025 terbaru, yakni Rp310,4 triliun.

Menkeu Purbaya juga mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB per Agustus 2025. "Ini realisasi APBN sampai 31 Agustus 2025. Pendapatan negara Rp1.638,7 triliun. Itu 57 persen terhadap outlooknya," ungkapnya.

Defisit ini terjadi imbas pendapatan yang baru mencapai Rp1.638,7 triliun. Uang yang masuk ke kas negara itu menyentuh 57,2 persen dari target di APBN 2025.

Pendapatan negara dikantongi dari penerimaan pajak sebesar Rp1.330 triliun dan kepabeanaan serta cukai senilai Rp122,9 triliun.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia membelanjakan uang lebih besar senilai Rp1.960,3 triliun. Jumlah tersebut setara 55,6 persen dari pagu anggaran yang tersedia.

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan negara Menkeu Purbaya menyiapkan enam program hasil cepat (quick win). Pertama, penempatan Rp200 triliun di sistem perbankan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian penerimaan pajak berbalik positif apabila pertumbuhan ekonomi terakselerasi.

Purbaya optimis dampak positif kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan akan terasa pada tiga bulan terakhir 2025. Dengan demikian, menurutnya, penerimaan pajak juga tumbuh positif.

"Jadi saya naikin pendapatan [negara] bukan dengan naikan tarif, tapi dorong aktivitas ekonomi supaya pajak lebih besar. Anda juga enggak kerasa bayarnya. Kalau ekonominya tumbuh kencang, kan Anda bayar pajaknya happy [senang]. Itu yang kita kejar," ujar Purbaya.

Kedua, menagih 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. "Kita mau kejar, eksekusi. Itu targetnya sekitar Rp50—60 triliun. Dalam waktu dekat ini kita tagih, dan mereka enggak bisa lari," kata Purbaya.

Ketiga, Kemenkeu juga memperkuat penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Keempat, Kemenkeu melakukan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga lain untuk memudahkan penagihan pajak. Kelima, optimalisasi Coretax. Purbaya meyakini bisa memperbaiki berbagai permasalahan Coretax dalam satu bulan. "Nanti saya bawa jago-jago dari luar yang jago IT untuk perbaiki itu dengan cepat," ungkap Purbaya.

Keenam, patroli rokok ilegal. Purbaya mengaku sudah memanggil lokapasar digital seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, terutama rokok. (han,ist/lut)



DISPENDUKCAPIL TEMUKAN 1.000 WARGA MENINGGAL BELUM TERDATA

BAHTIYAR RIFAI: SOSIALISASI TINGKAT RT-RW HARUS LEBIH MASIF

SURABAYA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mengungkapkan masih terdapat sekitar 1.000 warga yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan akta kematiannya artinya belum terdata.

Kondisi ini dinilai dapat mengganggu akurasi data kependudukan dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mendorong adanya sosialisasi masif hingga ke tingkat RT dan RW agar masyarakat lebih sadar pentingnya melaporkan peristiwa kematian.

“Saya berharap adanya sosialisasi yang masif mulai dari RT, RW, hingga lurah agar selalu mengingatkan warga Surabaya untuk tertib administrasi kependudukan. Baik itu pelaporan kematian maupun kelahiran,” kata Bahtiyar ketika ditemui Lentera di ruangnya, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, fenomena keterlambatan pelaporan kematian kerap menimbulkan kekhawatiran warga akan hilangnya bantuan sosial. Padahal, lanjutnya, justru keterlambatan inilah yang berpotensi menghilangkan hak-hak ahli waris di kemudian hari.

“Biasanya orang baru mengurus akta kematian ketika membutuhkan untuk waris atau peralihan hak. Ini berisiko, karena bisa jadi datanya sudah tidak sesuai. Padahal pemerintah kota perlu memperbarui data kependudukan agar penyaluran bansos dan pelayanan publik lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Bahtiyar juga menekankan pentingnya peran aktif RT dan RW sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota untuk membantu warga melapor kematian. Ia menilai



Warga Surabaya saat mengurus Surat Keterangan ahli waris di Kantor Kecamatan Pabean Cantikan.

sistem digital yang telah dikembangkan Pemkot Surabaya seharusnya semakin mempermudah proses tersebut.

“Saat ini mengurus kematian tidak perlu datang ke Dispendukcapil. Cukup lewat balai RW, RT, atau aplikasi daring. Bahkan ke depan bagus kalau ada aplikasi khusus yang dimiliki RT/RW untuk melaporkan kematian warganya,” ujarnya.

Ia menambahkan, petugas Dispendukcapil di kelurahan juga bisa menjadi pionir dalam penguatan tertib administrasi kependudukan. “Surabaya ini sudah kota modern, kota digital. Jadi, pelayanan online-nya harus makin terbuka agar warga mudah dan tidak menunda-nunda,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan sebagian besar warga enggan melaporkan kematian anggota keluarganya karena alasan sosial dan kekhawatiran

kehilangan bantuan sosial dari pemerintah.

“Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya meninggal tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Rata-rata motivasinya karena sosial,” jelas Eddy.

Ia menegaskan, kekhawatiran tersebut tidak beralasan karena mekanisme dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial (Dinsos) sudah memungkinkan agar bantuan bisa dialihkan kepada istri atau ahli waris yang sah.

“Padahal, dari Kemensos dan Dinsos sudah ada mekanisme agar bantuan bisa dialihkan. Jadi tidak perlu takut melapor,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti masih adanya warga yang malas mengurus administrasi, meski layanan kini bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi KNG Mobile dan website resmi Dispendukcapil Surabaya.

“Semua layanan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga akta

kematian sudah bisa diakses dari rumah lewat ponsel. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tertib adminduk,” ujarnya.

Eddy menuturkan, ketertiban administrasi kependudukan adalah kunci agar Pemkot Surabaya dapat memberikan pelayanan publik dan intervensi sosial yang tepat sasaran.

“Kalau datanya tidak sesuai, kami kesulitan melakukan intervensi, baik saat musibah maupun penyaluran bantuan,” tutupnya. (adv,am/lut)



Saya berharap adanya sosialisasi yang masif mulai dari RT, RW, hingga lurah agar selalu mengingatkan warga Surabaya untuk tertib administrasi kependudukan. Baik itu pelaporan kematian maupun kelahiran,”

BAHTIYAR RIFAI
Wakil Ketua DPRD
Kota Surabaya